

**FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PETAHANA NANANG-PANDU  
DI KECAMATAN NATAR  
(STUDI KASUS PILKADA DI KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN TAHUN 2020)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Dara Indira Adinda Narra  
(1646021034)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRACT**

### **FACTOR CAUSING THE DEFEAT OF THE INCUMBENT NANANG-PANDU IN NATAR SUB-DISTRICT (The Case Study Of Local Elections In Kabupaten Lampung Selatan For The Year 2020)**

**BY**

**Dara Indira Adinda Narra**

The return of the incumbent in the regional head election should first evaluate how he performed when he was still in office. The loss of Nanang, who is the incumbent, attracted attention when he suffered a defeat that only lost in the constituency of Natar District. What factors influenced the defeat of Nanang-Pandu and what were the implications of the incumbent's defeat in the Regional Head Election in Natar District. This study will use a qualitative method with a descriptive type. The focus of this study emphasizes the defeat of the incumbent which only occurred in Natar District. A vital tool in winning the Regional Head Election lies in social capital which pays attention to economic capital and political capital owned. By using a political communication strategy both ways, plans, and efforts to achieve the desired goal is the key to the success of political partners in a contestation. The Covid-19 phenomenon that has caused a decrease in public participation, many registered people do not get the C6 form, the lack of community proximity to the candidate pair, coupled with the issue of the estrangement of the Nanang-Pandu pair who are never seen together when meeting the community. Maximizing strengths so as to generate new opportunities that have an impact on the image of the candidate pair, as well as the need for a special strategy for the candidate pair in dealing with unexpected situations.

Keywords: Elections, Incumbent Pairs, Losses

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PETAHANA NANANG-PANDU DI KECAMATAN NATAR (Studi Kasus Pilkada Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020)**

**Oleh**

Dara Indira Adinda Narra

Kembalinya petahana dalam pemilihan kepala daerah hendaklah harus mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana kinerjanya ketika masih memegang jabatan. Kalahnya Nanang yang merupakan petahana menarik perhatian ketika dia mengalami kekalahan yang hanya kalah di daerah pemilihan Kecamatan Natar saja. Faktor apa saja yang mempengaruhi kekalahan Nanang-Pandu serta bagaimana implikasi kekalahan petahana dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Natar. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Fokus pada penelitian ini menekankan pada kekalahan petahana yang hanya terjadi di Kecamatan Natar. alat vital dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah terletak pada modal sosial yang memperhatikan modal ekonomi, dan modal politik yang dimiliki. Dengan menggunakan strategi komunikasi politik baik cara, rencana, dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan merupakan kunci dari keberhasilan pasangan politik dalam sebuah kontestasi. Fenomena Covid-19 yang membuat adanya penurunan partisipasi masyarakat, banyak masyarakat yang terdaftar tidak mendapatkan form C6, kurangnya kedekatan masyarakat dengan pasangan calon, ditambah dengan isu kerenggangan pasangan Nanang-Pandu yang tidak pernah terlihat bersama saat menemui masyarakat. Memaksimalkan kekuatan sehingga menghasilkan peluang baru yang berdampak ada citra pasangan calon, serta perlunya strategi khusus pasangan calon dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

Kata Kunci : Pilkada, Pasangan Petahana, Kekalahan

**FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PETAHANA NANANG-PANDU  
DI KECAMATAN NATAR  
(STUDI KASUS PILKADA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2020)**

**Oleh**

**DARA INDIRA ADINDA NARRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PETAHANA  
NANANG-PANDU DI KECAMATAN NATAR (STUDI  
KASUS PILKADA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2020)**

Nama : **Dara Indira Adinda Narra**

NPM : 1646021034

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**



Penguji : **Drs. R. SigitKrisbintoro, M.I.P.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Dara Indira Adinda Narra  
NPM. 1646021034

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Dara Indira Adinda Narra dilahirkan di Serang, 11 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari bapak Noldy Kahirul Rahmady Narra dan ibu Yunila. Jenjang pendidikan penulis dimulai di TK DEPAG Kalianda Lampung Selatan, dilanjutkan di SDN 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis selanjutnya menempuh pendidikan di SMP N 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan melanjutkan pendidikan di SMA N 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri UNIVERSITAS LAMPUNG. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2016.

## MOTTO

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

**(HR Muslim, No. 2699).**

*"Percaya diri dan mencintai diri sendiri adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Karena dibalik banyaknya kekurangan yang kita miliki, ada begitu banyak pula kelebihan yang tidak kita sadari... so... love your self"*

**(Dara Indira Adinda Narra)"**

"Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan dimasa depan, menurut ku hal yang paling penting adalah percaya bahwa kamu bisa melakukannya sendiri. Ini adalah hayi yang percaya pada yang tak terlihat. Kamu pasti bisa melakukannya, dan aku piker mendorong diri sendiri seperti itu adalah rahasia untuk mencapai impian kamu".

**(Mark Lee NCT)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah  
segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,  
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Bapak dan Ibu Tercinta

**Noldy Kahirul Rahmady Narra dan ibu Yunila**

Adikku tersayang

**Nada Nadila Adella Narra**

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi  
ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Kekalahan Petahana Nanang-Pandu Di Kecamatan Natar (Studi Kasus Pilkada Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020) Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Penguji Akademik peneliti.
4. Bapak Darmawan purba, S.IP., M.I.P. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing utama dan dosen terfavorit saya yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur mendapatkan ilmu dan pelajaran dari bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi penulis untuk merengguh ilmu pengetahuan.
6. Ayah Noldy Khairul Rahmady Narra dan Bunda Yunila yang sangat Penulis cintai dan sangat Penulis sayangi selama-lamanya, yang selalu sabar mendampingi putrimu ini termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan yang sudah diberikan baik fisik maupun materi, doanya yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran proses skripsi putri kalian. Tidak akan cukup apabila Penulis ingin menyebutkan segala kebaikan yang telah Ayah dan bunda berikan selama ini, dari kecil sampai dengan dewasa. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanannya untuk menjadikan putrimu insan yang berpendidikan, disamping keterbatasan yang Ayah dan Bunda punya demi memberikan hal-hal terbaik bagi putri-putrimu. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kelancaran dan kemudahan disetiap kegiatan yang Ayah Bunda lakukan. Semoga dengan ini, Ayah dan Bunda bangga bisa melihat tete lulus sebagai Sarjana Ilmu Pemerintahan.
7. Adikku tersayang, Nada Nadila Adella Narra terimakasih dukungan yang adik berikan selama ini kepada kakak. Terimakasih juga untuk doanya dan nasehat yang suka adik kasih ke kakak untuk tidak pernah nyerah dan pasrahkan semuanya kepada Allah SWT dan selalu ingetin kuncinya adalah ibadah untuk semua hal. Semangat sekolahnya, InshaaAllah tahun depan adik lulus juga dari bangku perkuliahan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang adik inginkan. Terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan perhatian sama kakak selama ini, selalu jadi adik yang pintar dan nurut kepada kedua orang tua. Semangat, semoga dipermudah semua urusan adik sekarang dan seterusnya. Sehat selalu, semoga kita diberi umur panjang dan kesuksesan supaya bisa membanggakan dan balas semua kebaikan Ayah dan Bunda Aamiin.

8. Keluarga besar penulis dari keluarga ayah yang berada di Manado dan Makassar, lalu keluarga besar ibu yang berada di Lampung, baik Om, Tante, Sepupu. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga kita selalu di berikan Kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT, Aamiin.
9. Terima kasih kepada tante Rela Mardiana S.Pd dan om Asep Tamrin yang sudah membantu penulis selama proses membuat skripsi ini. Semoga Om dan Tante selalu di berikan Kesehatan dan selalu di lancarkan rezeki dan Allah SWT selalu meridhoi, Aamiin.
10. Terima kasih untuk sahabat sahabat penulis yang telah memberikan segala dukungan, motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini, sahabatku Dinda dan Icak, walaupun kita jarang bertemu, tapi doa dan komunikasi kita masih selalu terhubung sampai kapanpun. Terimakasih sudah jadi sahabat yang baik yang selalu mendukung dan sabar serta pengertian selama ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap Langkah kita, Aamiin.
11. Sahabat penulis yaitu Silvia Wulandary S.I.P , Nana Ari Aditya, Reni Agustin S.I.P, Adis Ananda Putri S.I.P, Hania Saputri, S.IP dan semua rekan rekan Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas waktu dan dukungan dan bantuan selama membuat skripsi ini, dan perhatian kasih sayangnya selama ini. Semangat juga untuk kalian yang sudah mendapatkan gelar semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah kalian dan proses yang kalian lalui, Aamiin. Dan yakinlah semua akan indah pada waktunya. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis haturkan kepada kalian atas segala bnetuk bantuannya selama penulis proses mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menuntun jalan kita dan senantiasa mendapat ridhoNya, Aamiin.
12. Adik-adik jurusan Ilmu pemerintahan Angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak sudah memberikan dukungan selama perkuliahan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga mendapat ridho Allah SWT, Aamiin.
13. Terakhir ucapan terimakasih untuk orang- orang baik yang telah memberikan motivasi dan support untuk penulis selama proses skripsi, Gifari Rizky Pradana, dan Idol Kpop NCT (Neo Culture Technology) yang beranggotakan

Taeil, Juhnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Kun, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Hendery, Xiaojun, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Shotaro, Chenle, Sungchan, Jisung. Terimakasih untuk kalian semua atas dukungan dan motivasinya selama ini dan terkhusus kepada Haechan dan Gifari yang selalu memberikan semangat dan energi positif, selama proses penulis mengerjakan skripsi.

14. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah penulis sebutkan di atas untuk semangat, doa, dan dukungannya dalam membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Dara Indira Adinda Narra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Pemilihan Kepala Daerah .....	11
2.2 Kepala Daerah Incumbent/Petahana .....	16
2.3 Tinjauan Komunikasi Politik .....	19
2.3.1 Pengertian Komunikasi .....	19
2.3.2 Pengertian Komunikasi Politik .....	22
2.3.3 Unsur-Unsur Komunikasi Politik .....	23
2.3.4 Konsep Kampanye Politik .....	25
2.3.5 Startegi Komunikasi Politik .....	26
2.4 Kerangka Pikir .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Tipe Penelitian .....	30
3.2 Fokus Penelitian .....	31
3.3 Informan .....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	37
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	39

4.1	Gambaran Umum Lampung Selatan .....	39
4.1.1	Jumlah Kecamatan di Lampung Selatan .....	39
4.1.2	Periodisasi Kepala Daerah Lampung Selatan .....	41
4.1.3	Biografi Nanang – Pandu .....	42
4.1.4	Partai Pengusung dan Tim Pemenangan Nanang-Pandu ...	43
4.1.5	Visi dan Misi Nanang-Pandu .....	44
4.2	Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan .....	45
4.3	Petahana/Incumbent Pasangan Calon Nanang dan Pandu .....	46
4.4	Kalah di Kecamatan Natar .....	47
4.5	Komunikasi Politik Nanang-Pandu .....	48
4.6	Implikasi kekalahan Petahan Nanang-Pandu di Kecamatan Natar.....	49
4.7	Perolehan Suara Kecamatan Natar.....	51
4.8	Profil Penduduk dan Tingkat Pendidikan .....	52
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1	Faktor-Faktor Kekalahan Nanang-Pandu di Kecamatan Natar.....	55
5.1.1	Pemimpin Politik.....	58
5.1.2	Menciptakan Kebersamaan .....	64
5.1.3	Negosiasi.....	67
<b>VI.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
6.1	Kesimpulan .....	71
6.2	Saran .....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2020.....	5
2. Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Selatan Tahun 2020.....	6
3. Jumlah Kecamatan di Lampung Selatan .....	39
4. Periodisasi Kepala Daerah Lampung Selatan .....	41
5. Hitung Suara Pilkada Lampung Selatan .....	51
6. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	29
2. DPT Lampung Selatan .....	40
3. Hasil Pemilukada Lampung Selatan 2020 .....	56

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah menjadi agenda penting untuk menyalurkan hak pilih dalam memilih kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung sesuai penilaian masyarakat untuk memimpin suatu daerah dalam waktu lima tahun. Sistem pemilihan yang awalnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini dipilih langsung oleh rakyat yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan ke sistem langsung telah mengharuskan masyarakat untuk dapat berpartisipasi menegakkan demokrasi dengan seadil-adilnya melalui ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Penyelenggara dalam pilkada langsung sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisan.

KPUD dalam hal ini sebagai penyelenggara, adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan

antar pemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56, Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan mengenai pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada langsung artinya mengembalikan “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. (Syahputa, 2019: 4)

Pesta demokrasi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang. Undang-Undang tersebut berbunyi:

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni

Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 2015.”

Penyelenggara dalam pilkada langsung sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan nonpartisan. KPUD dalam hal ini sebagai penyelenggara, adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum, oleh karena itu pemilihan umum adalah dianutnya sistem demokrasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, terdapat sistem pemerintahan yang demokratis, haruslah dikelola sedemikian rupa, agar seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk dipilih dan juga memilih dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan di jajaran eksekutif (Usman 2004).

Pemilihan secara langsung dimana pemilih dapat menentukan siapa saja kandidat yang dianggap cakap dan layak berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tertentu, misalnya platform- visi, misi, program partai dan ideologi, rekam jejak kandidat, karakteristik individu kandidat, janji-janji politik, figur kandidat. Pemilihan secara langsung menyebabkan suara pemilih sangat menentukan kemenangan kandidat. Oleh karena itu, partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya menjadi sangat penting. Pemilih memiliki daya tawar yang kuat dimata partai dan kandidat. Kandidat harus mampu menarik hati calon pemilih dan harus mampu mempengaruhi mereka untuk memilih kandidat. Dengan demikian, tingkat persaingan kandidat memperebutkan suara masyarakat atau pemilih menjadi tinggi.

Pemilihan kepala daerah di 6 kabupaten dan 2 kota dari 15 kabupaten atau kota se-Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu, seharusnya diikuti oleh sebanyak 28 pasangan calon, namun menjelang dimulainya pemilihan kepala daerah serentak, seorang kandidat petahana dari Kabupten Lampung Timur wafat, sehingga total 27 pasangan calon yang maju di Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung 2015. Berdasarkan laporan akhir pendaftaran pemilihan kepala daerah pada Selasa, 28 Juli 2015, dari 6 kabupaten dan 2 kota penyelenggara pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung ada 5 wilayah yang terdapat calon petahana, yaitu Kabupten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan. Dari 5 wilayah tersebut, terdapat 7 petahana yang lolos seleksi KPU. (Armansyah, 2020).

Seorang petahana seharusnya dapat melakukan kampanye dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wakil rakyat dalam melayani dan membangun wilayah sekaligus untuk kampanye. Sehingga, jika dilihat dari kursi jabatan dan peluang yang dimiliki, seharusnya petahana mampu memenangkan pemilihan kepala daerah pada periode keduanya, di karenakan petahana dapat memanfaatkan jabatan yang disandingnya untuk melakukan kampanye (Boyne, 2009). Majunya petahana dalam pemilihan kepala daerah menciptakan tiga model peluang yaitu terdapatnya jalinan hubungan yang baik dengan kelompok kepentingan dan elit di daerah, kemudian dikenal dengan model *direct officeholder*. Model *campaign discount*, pada model ini, petahana tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membuat ia terpilih lagi dalam pemilihan dan model ini menunjukkan nama besar yang dimiliki petahana.

Model *district partisan bias*. *District partisan bias* yakni, kecenderungan basis pendukung petahana atas wilayah tertentu yang dihasilkan dari kinerja petahana maupun kedekatan petahana dengan elit di dalam suatu domain wilayah tertentu (Gordon, 2009). Petahana yang maju kembali dalam pilkada seharusnya memiliki peluang yang besar untuk menang. Pilkada di Lampung

dilaksanakan pada 8 Kabupaten/Kota dan 7 dari delapan Kabupaten/Kota tersebut terdapat petahana yang mengikuti kembali pilkada tahun 2020, kecuali di Metro. Empat petahana mengalami kemenangan dan 3 petahana mengalami kekalahan. Kabupaten Lampung Selatan sendiri petahananya mendapatkan kemenangan. Namun di beberapa Kecamatan, Nanang sebagai petahana pada pilkada Lampung Selatan mengalami kekalahan. Terutama Kecamatan Natar, Nanang beserta pasangannya kalah telak di Kecamatan tersebut. Kekalahan Nanang-Pandu hanya di Kecamatan Natar dibuktikan dengan data perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2020 dan Perolehan Suara

No Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Perolehan Suara	Presentase
1	Nanang Ermanto	Pandu Kesuma Dewangsa	159.987 Suara	36,15%
2	Tony Eka Candra	Antoni Imam	146.115 Suara	33,02%
3	Hipni	Melin Haryani Wijaya	136.459 Suara	30,83%

*Sumber : KPUD Kabupaten Lampung Selatan*

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa petahana Nanang beserta pasangannya berhasil memenangkan pilkada, Namun tidak disemua Kecamatan yang ada di Lampung Selatan Nanang dan pasangannya mengalami kemenangan, terdapat beberapa Kecamatan mereka kalah perolehan suaranya dengan dua pasangan calon lain. Dari 17 Kecamatan yang ada di Lampung Selatan Nanang-Pandu mengalami kekalahan yaitu di Kecamatan Natar, Sidumulyo, Katibung, Raja Basa, Candipuro, Tanjung Sari dan Way Sulan. Kecamatan Natar pasangan Nanang-Pandu kalah telak perolehan suara dengan pasangan calon Hipni-Meli. Berikut datanya berdasarkan perolehan suara masingmasing calon pada setiap Kecamatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui faktor kekalahan (Nanang) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Calon			Jumlah
		Nanang-Pandu	Tony-Antoni	Hipni-Melin	
1	Natar	20.543	18.475	38.676	77.694
2	Tanjung Bintang	16.397	9.977	8.098	34.472
3	Kalianda	15.565	15.412	8.970	39.947
4	Sidumolyo	6.238	14.585	6.573	27.396
5	Katibung	10.120	10.604	7.108	27.832
6	Penengahan	7.009	5.015	6.752	18.776
7	Palas	10.753	7.135	9.850	27.738
8	Jati Agung	18.577	13.145	15.580	47.302
9	Ketapang	10.700	6.781	5.073	22.554
10	Sragi	6.198	4.177	5.293	15.668
11	Raja Basa	3.615	4.218	3.927	11.760
12	Candipuro	6.149	13.323	5.871	25.343

No	Kecamatan	Nama Calon			Jumlah
		Nanang-Pandu	Tony-Antoni	Hipni-Melin	
13	Merbu Mataram	10.043	7.386	6.513	23.942
14	Bakauheni	4.903	2.540	1.910	9.353
15	Tanjung Sari	5.638	5.713	3.427	14.778
16	Way Sulan	3.598	4.626	1.910	10.134
17	Way Panji	3.941	3.003	928	7.872
<b>Total Suara</b>		<b>159.987</b>	<b>146.115</b>	<b>136.459</b>	<b>442.561</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Lampung Selatan*

Kembalinya petahana dalam ranah pemilihan kepala daerah hendaklah harus mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana kinerjanya ketika masih memegang jabatan. Evaluasi yang di maksud yaitu kandidat harus memperhatikan modal sosial, modal ekonomi, modal politik yang dimiliki, karena tiga modal tersebut merupakan syarat vital untuk mampu memenangkan pemilihan kepala daerah. Kalahnya Nanang yang hanya di daerah pemilihan Kecamatan Natar juga mendorong penulis untuk mengetahui apakah ada implikasi di Kecamatan Natar terhadap pelayanan masyarakat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus yang berbeda, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Beberapa penelitian terkait dengan pembahasan diatas mengenai faktor penyebab kekalahan petahana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Saiful zuhri (2015) pada penelitiannya Analisis Swot Terhadap Kekalahan Petahana (Mustafa) Di Daerah Pemilihan Kecamatan Terbanggi

Besar Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, yang berfokus pada implikasi kekalahan petahana (Mustafa) di daerah pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 terhadap pelayanan masyarakat menunjukkan bahwa, kalahnya Mustafa yang hanya di kecamatan Terbanggi Besar saja, tidak membawa dampak terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Linati, Lestari. (2011), berfokus pada *accidental* yang di artikan sebuah kebetulan. Kemudian, intensional dimana pemilih memiliki motivasi tertentu melakukan pilihan yang berbeda pada tiap tingkatan pemilihan sehingga menyebabkan terjadinya spit ticket voting. Penelitian Linati ini berjudul Kekalahan Lalu Serinata - Husni Djibril Pada Pilkada Nusa Tenggara Barat Tahun 2008. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Dias Al Kaisya (2012), Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Incumbent Edy Sutrisno pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2010. Menitik beratkan pada penyampaian pesan yang tidak tepat sasaran, penyampaian pesan oleh tim kampanye yang tidak menarik, serta kegagalan masyarakat dalam memahami pesan kampanye.

Penelitian lain dilakukan oleh Monicha, Anggraini. (2013) yang berjudul Faktor Penyebab kekalahan Zainal Abidin (incumbent) dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013. Berfokus pada pemilih memberikan suara penghukuman kepada incumbent dengan cara menjatuhkan pilihannya kepada orang lain. Kepemimpinan yang buruk dari incumbent.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu petahana (Nanang) hanya kalah di Kecamatan Natar saja dan penelitian sebelumnya kandidat atau petahana mengalami kekalahan secara umum dan ada juga penelitian yang sama dengan penelitian ini berdasarkan perhitungan suara, sehingga penulis ingin mengetahui factor kekalahan petahana (Nanang)

di daerah Kecamatan Natar pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kalahnya (Nanang) pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan natar mendorong penulis untuk mengetahui apakah implikasi di Kecamatan Natar terhadap pelayanan masyarakat yang ada di Kecamatan Natara Kabupaten Lampung Selatan, maka dari itu penulis menjelaskan sebagian penelitian di sub-bab di atas.

Kembalinya petahana dalam ranah pemilihan kepala daerah hendaklah harus mengevaluasi terlebih dahulu hal tersebut merupakan syarat vital untuk mampu memenangkan pemilihan kepala daerah. Kalahnya Nanang yang hanya di daerah pemilihan Kecamatan Natar juga mendorong penulis untuk mengetahui apakah ada implikasi di Kecamatan Natar terhadap pelayanan masyarakat. Kalahnya petahana (Nanang) yang hanya di daerah pemilihan Kecamatan Natar seperti yang dijelaskan pada sub-bab di atas, menjadi alasan penulis untuk memilih Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Kecamatan Natar sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang kekalahan petahana pada pemilihan kepala daerah. Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu mengenai calon perseorangan yang melihat sudut pandang yang berbeda dengan penulis teliti dari fokus penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini akan menganalisis tentang faktor kekalahan calon petahana. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Faktor Penyebab Kekalahan Petahana Di Kecamatan Natar (Studi Kasus Pilkada Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa faktor kekalahan petahana (Nanang) di daerah pemilihan Kecamatan Natar pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020?
2. Apa implikasi kekalahan petahana (Nanang) di daerah pemilihan Natar pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 terhadap pelayanan masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor kekalahan Petahana (Nanang-pandu) pada pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
2. Untuk melihat implikasi kekalahan Petahana (Nanang-pandu) pada pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan Natar.

## **1.4 Manfaat Penilitia**

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjelaskan beberapa faktor mengenai penyebab kekalahan Petahana (Nanang-pandu) pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan masyaakat sekitar untuk memecahkan masalah yang ada, baik secara internal dan eksternal, yang dapat meningkatkan penilaian atas Kekalahan Petahana (Nanangpandu) pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan

kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasiya terpenuhi dengan baik. Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut. Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala

daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, menurut Rozali (2005: 53) Pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
4. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”.

Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28), asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau

pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan;

## 6. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal lima ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
2. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
3. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;

9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

## **2.2 Kepala Daerah Incumbent/Petahana**

Secara harfiah Incumbent berasal dari bahasa latin yang bermakna “bukti”, secara sederhana bahwa incumbent adalah calon kepala daerah yang telah terbukti. Penyifatan selanjutnya tergantung bagaimana selama dia menjabat sebagai Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Terbukti gagalah, sukseskah atau mungkin terbukti korupsi. Pada kitab Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, kata TAHANA dirujuk ke kata TAKHTA yang berarti singgasana, kursi kerajaan, kedudukan, geta, mahkota, kekuasaan, kehormatan, persemayaman, posisi, tahana.

Pencalonan incumbent dalam sebuah pilkada, tentu membutuhkan beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam meraih dukungan atau suara masyarakat. Calon incumbent lebih diunggulkan dari beberapa sisi diantaranya, yaitu: membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, lebih mengetahui permasalahan pembangunan daerah, pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan ini dapat berguna untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat mendapat dukungan kembali saat mencalonkan diri.

Seringkali pilkada langsung digelar, pasangan kandidat yang didukung kursi parlemen terbanyak dan sekaligus incumbent berhasil memenangkan pilkada langsung, jika dilihat dari segi personal pasangan kandidat, pasangan kandidat incumbent setidaknya sudah mempunyai keunggulan sendiri dibandingkan dari kandidat bukan incumbent seperti, popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa, dan persiapan financial, rekrutmen tim sukses, strategi, taktik kemenangan serta pemahaman karakteristik masyarakat pemilih, sehingga masing-masing pasangan calon bersama tim sukses membutuhkan sebuah

strategi komunikasi yang efektif. Hal itu dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran, rasa simpati, dan dukungan dari para pemilih. Serta bagaimana membina hubungan antara pasangan calon dengan para pemilih, sehingga para pemilih mencoblos pasangan calon yang diusung tim sukses tersebut.

Partai politik dianggap mampu berperan sebagai tempat pengkaderan atau regenerasi kepemimpinan dalam sebuah sistem politik. Pengkaderan regenerasi yang dimaksudkan yaitu melalui pendidikan politik yang bisa dijadikan sebagai modal bagi para calon kepala daerah. Pendidikan politik yang didapatkan diharapkan dapat memberi pemahaman kepada kepala daerah dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Calon incumbent yang masih berwenang di daerahnya memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan yang menarik perhatian masyarakat agar dalam pemilihan kepala daerah periode selanjutnya incumbent mendapat perhatian khusus dari masyarakat.

Menurut Salomo Simanungkalit dari Harian Kompas mengusulkan kata 'pertahana' sebagai padanan kata 'incumbent' (Kompas, 12 Maret 2013:2). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahana mempunyai arti Kedudukan; Martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya) dan kata 'bertahana' yang berarti bersemayam; duduk'. Jika kita berpedoman pada pola pembentukan kata bahasa Indonesia, kata 'pertahana' dapat diterima. Coba kita lihat analogi sebagai berikut: tinju-bertinju-petinju, tatarbertatarpetatar. Maka: tahana-bertahanan-pertahana. Dari segi arti juga bisa diterima. Kata 'pertahana' dapat kita diartikan 'yang sedang memegang jabatan.

Dalam istilah seputar Pilkada, pertahana sering mengacu pada orang yang telah atau sedang menjabat. Sebagai contoh dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, kata pertahana artinya mereka yang menduduki jabatan bupati dan wakil bupati yang pada saat akan dilangsungkannya Pilkada. Pertahana disini bisa disejajarkan dengan incumbent, sehingga pertahana artinya sama

dengan incumbent. Dalam konteks pencalonan incumbent dalam sebuah pilkada, tentu membutuhkan beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam meraup dukungan atau suara masyarakat. Modal-modal tersebut yakni modal sosial dan modal politik. Modal sosial merupakan modal yang ditetapkan oleh incumbent selama menduduki jabatan. Dalam artian, bagaimana selama masa jabatannya dia membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, baik itu masalah pembangunan, pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat

Modal sosial ini dikumpulkan guna mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan harapan dalam pilkada mendatang incumbent dapat kembali terpilih. Hubungan-hubungan yang diawali pada masa kampanye dengan program-program kerja sebagai komitmen awal, tentu akan menjadi gerbang dalam mengumpulkan modal sosial untuk pilkada selanjutnya. Kedua adalah modal politik, salah satunya yaitu penggunaan kendaraan politik yakni partai politik dalam proses pencalonan. Partai politik dianggap mampu berperan sebagai tempat pengkaderan regenerasi kepemimpinan dalam sebuah sistem politik, yang mana dianggap mampu memberikan pendidikan politik yang dapat menjadi modal bagi para calon kepala daerah. Melalui posisinya, para incumbent itu akan berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka menaruh perhatian yang besar kepada rakyat.

Di samping itu dimaksudkan sebagai langkah untuk memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan sebelum menjabat, orientasi kebijakan seperti itu dimaksudkan sebagai bukti kepada para pemilih bahwa para incumbent itu memang layak untuk dipilih. Secara politik, kegagalan incumbent terpilih sebagai Kepala Daerah kembali merupakan pertanda bahwa mereka tidak mampu membangun akuntabilitas kepada masyarakat. Kegagalan ini biasanya berkaitan dengan persepsi masyarakat bahwa Kepala Daerah tersebut dipandang memiliki kekurangan-kekurangan di masa kepemimpinannya dan

adanya praktekpraktek penyalahgunaan kekuasaan. Implikasinya, kepercayaan masyarakat kepada Kepala Daerah itu berkurang.

Realitas demikian berimplikasi pada ketidakmampuan untuk melakukan akumulasi modal sosial. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertahana atau yang dalam bahasa inggris: incumbent, dalam dunia politik adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Pertahana sering digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, dimana sering terjadi persaingan antara kandidat pertahana dan nonpertahana.

## 2.3 Tinjauan Komunikasi Politik

### 2.3.1 Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* yang dalam bahasa inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “sama”, *communications*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Pada istilah pertama yaitu *communis* paling sering disebut dimana asal kata komunikasi berasal, yang pada dasarnya merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi memberikan saran bahwa suatu pikiran, makna, atau pesan dianut secara sama. Namun definisidefinisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi harus merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan “kita mengirimkan pesan” (Mulyana, 2001).

Berbicara mengenai definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar maupun yang salah. Seperti juga pada model atau teori, definisi diharuskan melihat dari segi kemanfaatannya untuk dapat menjelaskan fenomena yang didefinisikan serta mengevaluasinya. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit, misalkan “komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik”, atau lebih luas, misalnya “komunikasi

adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih” sehingga peserta dalam komunikasi ini bisa saja termasuk hewan, tanaman, dan bahkan juga jin (Mulyana 2001).

Komunikasi dapat memelihara dan menggerakkan kehidupan manusia sebagai penggerak dan alat yang menggambarkan aktivitas masyarakat serta peradaban yang dapat merubah naluri menjadi inspirasi melalui berbagai proses untuk menjelaskan, bertanya, memerintah, dan mengawasi. Selain itu, komunikasi adalah gabungan diantara ilmu pengetahuan, perasaan, dan pemikiran yang lahir dalam rupa benang ingatan manusia dari awal sampai pada aspirasi paling mulia dalam usaha secara terus-menerus untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik (Budiharso, 2003)

John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken (Mulyana, 2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga kerangka pemahaman tentang komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi.

1. Komunikasi sebagai tindakan satu-arah Suatu pemahan populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi mengisyaratkan penyanpaian pesan dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat, surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah ini oleh Michael Burgoon disebut “definisi berorientasi sumber” (*source oriented definition*). Definisi ini mengisyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respons orang lain.

2. Komunikasi sebagai interaksi konseptualisasi kedua yang sering diterapkan pada komunikasi adalah interaksi. Dalam arti sempit berarti saling mempengaruhi (*mutual influence*). Pandangan komunikasi sebagai iteraksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Komunikasi sebagai interaksi dipandang sedikit lebih dinamis daripada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Namun pandangan kedua ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, karena itu masih tetap berorientasi sumber, meskipun kedua pesan tersebut dianggap bergantian. Jadi, pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat mekanis dan statis.
  
3. Komunikasi sebagai transaksi Dalam konteks ini komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran orang lain didekatnya dan bahwa komunikasi sedang berlangsung, meskipun pelaku tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain menafsirkan perilaku verbal dan nonverbalnya. Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi adalah bahwa komunikasi tersebut tidak membatasi kita pada komunikasi yang disengaja atau respons yang dapat diamati.

Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun nonverbalnya. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi penerima” (*receiver-oriented definition*) seperti yang dikemukakan Burgoon, yang menekankan variabel variabel yang berbeda, yakni penerima dan makna pesan bagi penerima, hanya saja penerimaan pesan itu juga berlangsung dua-arah, bukan satu-arah.

### 2.3.2 Pengertian Komunikasi Politik

Setelah menguraikan definisi dari Komunikasi dan Politik, maka selanjutnya adalah definisi komunikasi politik. Ada banyak definisi komunikasi politik menurut para ahli sebagai berikut:

1. Denton dan Woodward dalam Mc Nair (1999:3) menjelaskan komunikasi politik bisa dipahami sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber daya publik dan otoritas resmi (siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan hukum, legislatif dan pemerintahan) serta sanksi resmi (siapa yang diberi penghargaan atau hukuman oleh Negara). (Junaedi, 2013:24).
2. Doris Graber dalam Mc Nair (1999:4) mendefinisikan komunikasi politik sebagai bahasa politik yang bukan hanya mengkompromikan retorika semata-mata namun juga tandatanda paralinguistik seperti gerak tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes (Junaidi, 2013:24).
3. Lord Windleshan dalam Subiakto dan Ida (2012:19 ) mengemukakan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan oleh pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain (Junaidi, 2013:24-25).
4. Pengertian lain dari komunikasi politik dikemukakan oleh Dan Nimmo yang menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang berhubungan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi aktual dan potensial yang mengatur manusia dibawah kondisi konflik. Nimmo dalam Subiakto dan Ida (2012:19).

Pengertian lain dari komunikasi politik dijelaskan oleh Dan Nimmo dimana ia menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan aktivitas komunikasi yang berkaitan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi yang actual dan potensial yang dapat mengatur manusia dibawah kondisi konflik (Nimmo dalam Subiakto dan Ida, 2012:19 dalam Junaedi, 2013:25).

McNair (1999:4) juga memaparkan pengertian komunikasi politik yang dibagi kedalam tiga hal; Pertama, komunikasi politik adalah semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh actor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. Kedua, komunikasi yang ditujukan kepada politikus oleh non politikus seperti halnya pemilih dan kolumnis surat kabar. Ketiga, komunikasi mengenai politikus beserta aktivitasnya seperti yang terlihat di berita-berita, editorial, serta bentukbentuk diskusi lain mengenai politik (Junaedi, 2013:25-26).

### 2.3.3 Unsur-unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai *body of knowledge* memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sumber (komunikator), penerima (komunika), *message* (pesan), media atau saluran, dan efek. Nimo (1987) dalam cangara (2009 : 37 ). Carl I Hoveland dalam Sumarsono (1989 : 35 ) mengemukakan bahwa unsur-unsur ini dalam komunikasi politik terdapat dalam tiga situasi atau struktur politik, yaitu unsur suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan unsur komunikator maupun komunikan. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut.

#### 1. Unsur-unsur pada suprastruktur

Unsur yang terdapat pada suprastruktur politik terdiri dari tiga kelompok, yaitu yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif. Tiga kelompok ini berasal dari elit politik, elit militer, teknokrat, dan profesional. Keseluruhan kelompok ini

biasanya mencerminkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (infrastruktur), karena terwujudnya prastruktur pada hakikatnya merupakan produk keterlibatan seluruh unsur yang ada pada infrastruktur.

## 2. Unsur-unsur pada infrastruktur

Sebagaimana suprastruktur, maka infrastruktur pun diwujudkan oleh unsur-unsur komunikasi politik, dimana unsur-unsur ini dibagi dalam asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok, antara lain: partai politik (*political party*). Kelompok yang mempunyai kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik (*media of political communication*), kelompok mahasiswa (*student group*) dan para tokoh politik (*political figures*). Kelompok wartawan dan kelompok mahasiswa dipisahkan dari kelompok *interest*, karena wartawan sebenarnya merupakan kelompok yang menjembatani antar suprastruktur dan infrastruktur hanya dilandasi oleh nilai yang memandang suatu keadaan sehingga apa yang dilakukan bersifat murni.

## 3. Unsur komunikator dan komunikan politik

Unsur yang paling menentukan dalam setiap bentuk komunikasi politik adalah komunikator dan komunikan. Kedua unsur ini mempunyai daya tarik yang kuat, karena keduanya merupakan dua unsur yang berbeda dalam nilai dan fungsinya. Schramm (1971:39), membedakan antara komunikator dan komunikan sebagai dua satuan yang terpisah (*two separate units*) yang mengadakan dua kegiatan yang terpisah pula (*two separate acts*). Secara sosiologis perbedaan ini dinyatakan sebagai jarak sosial yang disebabkan oleh latar belakang situasi dan kondisi sosial budaya serta kondisi politik yang berbeda. Hal yang paling esensial dalam komunikasi politik adalah bagaimana menserasikan kedua fungsi yang berbeda agar tumbuh situasi dan keadaan yang saling menguntungkan (*simbiose*

*mutualis*), baik dalam komunikasi internal atau komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun komunikasi eksternal yang melintas batas wilayah negara (*international communication*).

#### **2.3.4 Konsep Kampanye Politik**

Kampanye politik penuh dengan retorika, seperti aktor politik tertentu menantang kualifikasi pesaing politiknya, bahkan dukungan editorial surat kabar, majalah, televisi dan radio juga mengikuti garis demonstratif, memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung sekaligus memperteguh sifat-sifat negatif lawan politiknya. Menurut Aristoteles yang dikutip Nimmo (1989) dalam Sirajuddin (2005 : 14), bahwa dalam pengklasifikasian jenis-jenis kampanye politik, dapat diidentifikasi melalui tiga cara pokok, yaitu deliberatif, forensik, dan demonstratif.

Kampanye politik deliberatif dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggambarkan sejumlah keuntungan dan kerugian dan relatif dari cara-cara alternatif dalam melakukan segala sesuatu. Fokusnya adalah sesuatu yang akan terjadi dimasa depan ditentukan dimasa depan jika ditemukan kebijakan tertentu. Jadi, ia menciptakan dan memodifikasi pengharapan atas hal ihwal yang akan datang.

Sementara kampanye politik forensik adalah persoalan yuridis, kampanye ini berfokus pada apa yang terjadi dimasa lalu untuk menunjukkan apakah bersalah atau tidak, pertanggungjawaban, atau hukuman dan ganjaran. Pada prinsipnya kampanye ini berusaha mengungkap berbagai pelanggaran yang sedang atau telah dilakukan para pesaing politiknya sehingga memungkinkan khalayak berubah sikap terhadap pilihan politiknya saat pesta pemilihan umum.

Terakhir adalah kampanye demokratis yang dilakukan melalui epideiktik, artinya wacana yang memuji dan menjatuhkan lawan yang menjadi pesaing politik. Tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik atau *brand image* partai politik beserta aktor-aktornya sekaligus mempengaruhi citra buruk partai politik pesaing beserta aktor-aktor politiknya.

### 2.3.5 Strategi Komunikasi Politik

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010: 73). Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya.

Menurut Ardial (2010: 73) ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

#### 1. Keberadaan Pemimpin Politik

Menurut Ardial (2010: 77-78) kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu: (1) proses kepemimpinan dan karakter pemimpin; (2) hasil kepemimpinan; dan (3) sumber

kekuasaan. Pertama, berdasarkan proses kepemimpinan. Artinya kepemimpinan demokratis yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin, tetapi juga bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokratis. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi bukanlah pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan oleh beberapa pemimpin.

## 2. Menciptakan Kebersamaan

Langkah strategis kedua yang harus dilakukan seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan masyarakat (khalayak). Hal ini dilakukan dengan cara mengenal masyarakat dan menyusun pesan politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Anwar Arifin (2006: 63-64) menyatakan bahwa suasana homofili yang harus diciptakan antara politikus dengan khalayak adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaankepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik. Namun yang sangat penting adalah siapa tokoh yang akan melakukan komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayakny

## 3. Negosiasi

Komunikasi bisa menjadi mudah dan bisa juga sulit, tergantung pada orang yang akan mengomunikasikan sesuatu. Negoisasi bisa menjadi bagian yang selalu muncul dalam kegiatan komunikasi politik. Menurut Ardial (2010: 99-100), negosiasi bisa dijadikan

salah satu strategi komunikasi politik. Karena dalam negosiasi penuh dengan berbagai gaya dan seni, sehingga negosiasi bisa berjalan lancar. Negosiasi sangat terkait dengan komunikasi persuasif atau komunikasi yang membujuk. Ardial (2010: 101) menyatakan bahwa semua permasalahan yang timbul dapat dipahami bahwa dalam bernegosiasi kebebasan mengeluarkan pikiran dan integritas kedua belah pihak mutlak menjadi syarat utama. Penempatan kedua pihak yang akan bernegosiasi dalam posisi “menang-menang” menjadi bermanfaat dalam negosiasi. Hal ini tentu akan lebih dipermudah dengan adanya persamaan kepentingan dari kedua pihak.

## 2.4 Kerangka Pikir

Pilkada langsung artinya mengembalikan “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. (Syahputa, 2019: 4)

Pemilihan secara langsung dimana pemilih dapat menentukan siapa saja kandidat yang dianggap cakap dan layak berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tertentu, misalnya *platform* visi, misi, program partai dan ideologi, rekam jejak kandidat, karakteristik individu kandidat, janji-janji politik, figur kandidat. Pemilihan secara langsung menyebabkan suara pemilih sangat menentukan kemenangan kandidat. Seorang petahana seharusnya dapat melakukan kampanye dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wakil rakyat dalam melayani dan membangun wilayah sekaligus untuk kampanye.

Sehingga, jika dilihat dari kursi jabatan dan peluang yang dimiliki, seharusnya petahana mampu memenangkan pemilihan kepala daerah pada periode keduanya, di karenakan petahana dapat memanfaatkan jabatan yang disandingnya untuk melakukan kampanye.

Kalahnya Nanang yang hanya di daerah pemilihan Kecamatan Natar juga mendorong penulis untuk mengetahui apakah ada implikasi di Kecamatan Natar terhadap pelayanan masyarakat. Kalahnya petahana (Nanang) yang hanya di daerah pemilihan Kecamatan Natar seperti yang dijelaskan pada sub-bab di atas, menjadi alasan penulis untuk memilih Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah teori Komunikasi Politik menurut Ardial, 2010 yang menggunakan indikator yaitu keberadaan pemimpin politik, menciptakan kebersamaan dan negosiasi. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir  
*Sumber: Diolah peneliti, 2022*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe atau deskriptif. Berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja kuantitatif, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka kuantitatif, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Metode kualitatif digunakan karena mempunyai tiga kelebihan yaitu: pertama, lebih mudah mengadakan

penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi 40 ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi (Margono, 1998: 791-795.)

Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mencoba untuk melihat kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, dan kemudian diilustrasikan sebagaimana apa adanya. Kaitannya dengan hal tersebut Nana Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 31endid sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Mengingat sifatnya yang demikian, maka penelitian deskriptif dalam 31endidikan lebih berfungsi untuk memecahkan masalah praktis 31endidikan.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Meneliti faktor kekalahan petahana (Nanang) di daerah pemilihan Kecamatan Natar pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 serta implikasi kekalahan petahana (Nanang) di daerah pemilihan Kecamatan Natar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 terhadap pelayanan masyarakat, dengan menggunakan teori Komunikasi Politik yang memiliki tiga indikator yaitu keberadaan pemimpin politik, menciptakan kebersamaan dan negosiasi yaitu:

**1. Keberadaan Pemimpin Politik** Menurut Ardial (2010: 77-78) kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu: (1) proses kepemimpinan dan karakter pemimpin; (2) hasil kepemimpinan; dan (3) sumber kekuasaan. Pertama, berdasarkan proses kepemimpinan.

Artinya kepemimpinan demokratis yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin, tetapi juga bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokratis. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai dan lembaga lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi bukanlah pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan oleh beberapa pemimpin

2. **Menciptakan Kebersamaan** Anwar Arifin (2006: 63-64) menyatakan bahwa suasana homofili yang harus diciptakan antara politikus dengan khalayak adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik. Namun yang sangat penting adalah siapa tokoh yang akan melakukan komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya.
3. **Negosiasi yaitu** Ardial (2010: 101) menyatakan bahwa semua permasalahan yang timbul dapat dipahami bahwa dalam bernegosiasi kebebasan mengeluarkan pikiran dan integritas kedua belah pihak mutlak menjadi syarat utama. Penempatan kedua pihak yang akan bernegosiasi dalam posisi “menang-menang” menjadi bermanfaat dalam negosiasi. Hal ini tentu akan lebih dipermudah dengan adanya persamaan kepentingan dari kedua pihak.

### 3.3 Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan

ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. *Purposive* adalah teknik penentuan informan berdasarkan wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapinya, disamping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat di pertanggung jawabkan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan focus penelitian.

Sumber data primer:

1. Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber Sumber data sekunder
2. Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan seakurat mungkin terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Menurut Riduwan (2010: 51) wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan

untuk menjawab secara lisan pula, ciri utama wawancara adalah langsung bertatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi. Tujuan diadakannya wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2014: 186), antara lain mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari berbagai episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009: 495).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Melalui teknik wawancara data yang dibutuhkan lebih akurat karena langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu semi-terstruktur.

2. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsiparsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi

yaitu data dan artikel yang dibaca peneliti terkait dengan politik dinasti, pola rekrutmen, dan sebagainya.

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Taylor, 1995) terdiri dari:

#### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

#### **2. Interpretasi Data**

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta

memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014: 248). Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui prosedur reduksi data, *display* (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya dan diverifikasi. Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

### **2. *Display* (Penyajian Data)**

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Misalnya data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan peneliti pada penyajian data selanjutnya adalah

data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

### **3. Verifikasi Data**

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna, dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data. Setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

#### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi Data Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kereteria, dan paradigmanya sendiri. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi Menurut Afifuddin (2009:143)

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan Nanang-Pandu kalah dalam pertarungan di pemilukada Lampung Selatan 2020, diantaranya sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan penurunan angka partisipasi masyarakat dalam pagelaran demokrasi, terutama pada gelaran Pemilukada di Lampung Selatan tahun 2020.
2. Banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mendapatkan undangan (Form C6) dari temuan Bawaslu Lamsel terdapat 17 ribu lebih undangan atau form C6 dikembalikan.
3. Kurangnya kedekatan masyarakat dengan pasangan calon, mundurnya jadwal tahapan Pilkada yang direncanakan sejak awal, mekanisme dan prosedur pembatasan tatap muka pada saat kampanye yang hanya diperbolehkan 50 orang saja, serta waktu kampanye yang sangat singkat.
4. Isu – isu miring yang beredar seputar kerenggangan pasangan Nanang-Pandu, isu lain yang mengatakan bahwa Pandu Kesuma Dewangsa dianggap bukan dari Lampung Selatan serta Nanang Ermanto yang diduga tersandung kasus korupsi Lampung Selatan dan beberapa berita tentang money politic dari pihak lawan meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

## 6.2 Saran

Adapun penulis memberikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap tim sukses calon pasangan pemilukada harus memiliki strategi khusus untuk mengkampanyekan kandidatnya dalam menghadapi situasi yang tidak terduga atau *plain B*, dalam hal ini situasi covid-19 yang sangat dinamis dalam berbagai hal, begitupun perubahan iklim pemilukada yang drastis.
2. Mampu memaksimalkan kekuatan sehingga menghasilkan peluangpeluang baru (opportunities) yang berdampak pada positifnya citra pasangan Nanang-Pandu di masyarakat Lampung Selatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haboddin, M. (2017). *Ketika mahasiswa bicara pilkada*. Universitas Brawijaya Press.

Muslimin, K. (2019). *Buku ajar komunikasi politik*. Unisnu Press.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.

Romindo, R., Muttaqin, M., Saputra, D. H., Purba, D. W., Iswahyudi, M., Banjarnahor, A. R., ... & Simarmata, J. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis.

Suherman, A. (2020). *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*. Deepublish.

Suyuti, S. B. (2003). *Politik Komunikasi*. Grasindo.

Tjipton, F. (2006). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andy Offset.

Wibowo, R. A. (2019). *Komunikasi Bisnis*. Radna Andi Wibowo.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

## Jurnal

- Abidin, A. (2011). Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 26-42.
- Al Kaisya, M. Dias. 2012. Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Incumbent Edy Sutrisno Pada Pilwakot Bandr Lampung Tahun 2010. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Agus Pramusimo, 2004, Otonomi Daerah dan Pemiliha Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS, Vol 33 No 2, hlm 240.
- Ancok,D. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Gadjahmada Univercuty. Yogyakarta.
- Azis, A. *Strategi marketing politik Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja dalam memenangkan pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- DAMAYANTI, R. STRATEGI PASANGAN INCUMBENT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.
- Dedi Riyadmadji, 2003, Merintis Pemikiran Kepala Daerah Secara Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 223. Djuyandi, Y. (2017). Komunikasi politik tim pemenangan hendra hemeto dalam pemilihan ketua dpd ii partai golkar kabupaten gorontalo periode 2016–2021. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 10-21.
- Goestyari, K. A., & Komang, J.F.(2021). *Strategi Politik Pasangan Nanang-Pandu Dalam Kontestasi Pemilukada Lampung Selatan Tahun 2020*. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta
- Hadi, A., Asrori, A., & Rusman, R. (2021). Penelitian kualitatif: studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi.

Hartika, I. (2017). MODEL DAN PENERAPAN KOMUNIKASI ORGANISASI PENDIDIKAN ISLA

M. Hijri, 6(1).Hidayat, I. (2018). *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).

Humphrey, Albert. 2005. "SWOT Analysis for Management Consulting". Sri lumni Newsletter . SRI International

Ikhsan, M. F., & Mandalia, S. A. (2015). Komunikasi Public Relations Dalam Implementasi Teknik Lobi Dan Negosiasi Pada Kegiatan Eksternal Telkom Foundation. *eProceedings of Management*, 2(1).

Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 213  
 Pemilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010). Universitas Diponegoro, 2012  
 Miriam Budiardjo. 1998 dalam Partisipasi dan Partai Politik

Khotimah, K. (2020). *Analisis yuridis dan Fikih Siyāsah Dustūriyah terhadap wajib cuti selama masa kampanye Pilkada bagi calon Kepala Daerah Petahana: studi Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Kusnadi, S. A. (2017). Konflik Pilkada di Bandar Lampung 2010.

Lestari, L. (2011). *Kekalahan Lalu Serinata-Husni Djibril Pada Pilkada Nusa Tenggara Barat Tahun 2008* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Lubis, L. R. (2018). *Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Gubernur Djarot Dan Sihar Sitorus Pada Pilkada Sumut Tahun 2018* (Doctoral dissertation).

Manajemen Strategik. Bandung: Pustaka Setia.  
 Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Maria Stella Ignasia Pantouw, Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas

- Marijan Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm 89.
- Marzuki Alie, H.Dr (2015). *Penguatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Nasioanal Indonesia* : marzukialie.com
- PRATAMA MAULIDDITYA, R. I. V. A. L. D. Y. (2019). *STRATEGI MARKETING POLITIK PASANGAN ADE UU SUKAESIH DAN NANA SURYANA PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media. Prihatmoko, J. J. ( 2005).
- Pemilihan Kepala Daerah Langsung-Filosofi, *Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rachmat. (2014).
- Robert putnam ,Konversi Modal Sosial Menuju Modal Politik, *Jurnal Tentang Sebuah Gerakan Converting Sosial Capital Into Political Capital*, Hlm 1
- Rony, Z. T. (2017). *Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi (Jurus Mudah Gunakan Metode Kualitatif Tipe Studi Kasus)*.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rustam, M., & Pala, R. (2022). POLA KOMUNIKASI POLITIK REMAJA DI KECAMATAN RAPPOCINI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL. *SHOUTIKA*, 2(1), 7-26.
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *to-ra*, 142-156.
- Sugiono Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi. 2006, *Metode Penelitian Survey. Cetakan Kedelapanbelas. Edisi Revisi. Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta*
- Sembada, W. Y., & Sadjjo, P. (2020). Strategi Pesan Aktor Politik Dalam Media Sosial: Studi Kasus Akun Walikota Tangerang Selatan Banten. *JURNAL KOMUNIKASI, MASYARAKAT DAN KEAMANAN*, 2(1).  
doi:<http://dx.doi.org/10.31599/komaskam.v2i1.673>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, I., & Ubaidullah, M. A. (2019). KEMENANGAN PASANGAN INDEPENDEN RONI AHMAD DAN FADHLULLAH TM DAUD PADA PILKADA 2017 DI KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(4).
- Tjahjoko, G. T. (2015). Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada.
- Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309-343.
- Wance, M., & La Suhu, B. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 91-115.
- Wiandi, J. (2019). *Analisis Kekalahan Petahana (Studi Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- WIRAUSAHA, K. U. P. K., & DI BEKASI, P. B. S. PENELITI MUDA FAKULTAS.

## INTERNET

Armansyah. 2020. Tiga Nama Mencuat Maju Pilkada Lamsel 2020. <https://m.lampost.co/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 09.40 WIB.

Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 2020. Pilkada Lampung Selatan Diikuti Tiga Paslon, Hipni-Melin Nomor Urut 3. <https://www.lampungselatankab.go.id/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 09.44 WIB.

Gabrilin, Abba. 2020. Update Real Count KPU untuk Pilkada di Lampung, 3 Petahana Mendominasi. <https://regional.kompas.com/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 10.03 WIB.

Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Profil Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. <https://www.lampungselatankab.go.id/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 10.21 WIB.

Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 2020. Pilkada Serentak di Lampung Selatan Aman, Petahana Unggul Sementara Versi Hitung Cepat KPU. <https://www.lampungselatankab.go.id/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 10.28 WIB.

Sitanggang, Hisar. 2021. KPU Lampung Selatan tetapkan pasangan Nanang-Pandu sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. <https://lampung.antaraneews.com/>. Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 10.31 WIB.

Nursyafitri, Gifa Delyani. 2022. Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. <https://www.dqlab.id>. Diakses pada 09 Maret 2022 pukul 11.02 WIB.

## Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.